

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nita Sari¹, Rita Kala Linggi², Anwar Alaydrus³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, hal ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Benua Baru masih jauh dari kata maksimal, serta untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Benua Baru. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, adapun yang menjadi narasumber yaitu Ketua Karang Taruna, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, RT, dan Masyarakat serta Pemerintah Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Benua Baru berjalan dengan baik sesuai dengan 4 indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu. Partisipasi masyarakat melalui indikator partisipasi dalam proses perencanaan masyarakat terlibat dalam memberikan nilai-nilai dalam pembangunan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta terlibat dalam tahap perencanaan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai potensi masyarakat. Indikator Partisipasi masyarakat, dalam proses pelaksanaan masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa Benua Baru untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Indikator pemanfaatan hasil pembangunan dirasakan dalam jangka yang lama dan memberikan hasil yang efisien. Indikator Evaluasi masyarakat terlibat memberikan nilai-nilai terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, melalui input, proses, dan output dimana masyarakat dapat memberikan masukan. Sementara faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan faktor yang mempengaruhi ada dua yaitu intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/pendapatan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sarinitha@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

Kata Kunci: *Partisipasi, masyarakat, pembangunan, desa.*

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tujuan pembangunan, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi manusia berupa penduduk yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga, mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan tercapainya pelaksanaan program pembangunan.

Agar tercapainya pelaksanaan program pembangunan tersebut, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan. Anggaran pembangunan pedesaan secara khusus dicantumkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaannya harus melibatkan semua masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dalam pembangunan yang ada di desa. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, masyarakat harus ikut serta dalam pembangunan tersebut. Pemerintah perlu membina masyarakat dalam merencanakan apa yang dibutuhkan, melaksanakan program yang telah direncanakan, dan menjaga/melestarikan program yang telah dilaksanakan.

Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga evaluasi, masyarakat lah yang berperan dan mempunyai hak dalam memberikan ide, dan pengambilan keputusan, sehingga pembangunan dapat dinikmati masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur juga dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangatlah penting demi terwujudnya hasil-hasil pembangunan Desa Benua Baru. Sebagai wujud adanya partisipasi masyarakat di Desa Benua Baru saat ini, adanya kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial (BAKSOS). Bakti

sosial ini dilaksanakan tiap hari jum'at semua masyarakat ikut berpartisipasi seperti membersihkan masjid, kantor desa, balai desa dan jalan raya. Kemudian adanya pembangunan desa pada sektor olahraga seperti lapangan bola yang baru saja dibuat yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya masyarakat ikut serta sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ada. (Bapak Sadri sebagai masyarakat Desa Benua Baru).

Namun partisipasi masyarakat Desa Benua Baru relatif bervariasi dari segi intensitasnya, ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Berdasarkan Fenomena peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Benua Baru dari seluruh aspeknya, tidak berjalan secara maksimal, hal ini karena pemerintah desa sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, sehingga yang terjadi masyarakat seperti tidak dilibatkan dalam pembangunan desa.

Kemudian masyarakat juga ada yang bersifat tidak memiliki kesadaran/kemauan dan pendidikan serta penghasilan sehingga tingkat partisipasinya terhadap pembangunan desa sangat rendah. Keadaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa ataupun masyarakat sehingga sering terjadinya kefakuman.

Berdasarkan fenomena yang ada pembangunan masyarakat terutama pada pembangunan pedesaan terlaksana atau pun berhasil tidaknya, tidak hanya dari sektor pemerintahan yang mengambil ahli dalam menunjang keberhasilan itu, akan tetapi juga partisipasi dari masyarakat juga sangatlah menunjang akan keberhasilan dalam sebuah pembangunan desa demi terwujudnya pembangunan yang merata pada masyarakat itu sendiri, dengan asumsi ini penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur".

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu system pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Makmur (2003:48) mengatakan bahwa "partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri".

Utomo (2003:78) bahwa partisipasi adalah sebagai proses keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Wahyu (2005:244) partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang

mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Menurut Mikkelsen (dalam Adi, 2013:228) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Kemudian Gie (dalam Siagian, 2005:300) menyatakan bahwa partisipasi adalah Suatu aktivitas untuk membangkitkan perasaan diikut sertakan dalam kegiatan organisasi. Dan ikut serta bawahan dalam kegiatan organisasi.

Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang. Partisipasi berarti “mengambil bagian”, atau menurut Hoofsteede dalam Khairuddin (2000: 124) “*the taking part in one of more phases of the process*” (partisipasi berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses). Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan.

Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris di Identikkan dengan Society (Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak daripada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut Ralph Lington Kemudian menjelaskan (dalam (dalam Soerjono Soekanto: 2006) sebagai berikut : “Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah di tentukan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Defenisi menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitupun sebaliknya pada orang lain. Saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahuimelalui adanya kontak sosial (*Social Contact*) dan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Conyers (2004:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai

proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turun memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini selaras dengan konsep man-centred development (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu 24 jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif, dan kreatifitas dari keanggotaan masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Effendi (2002:101) “berpendapat pengertian partisipasi masyarakat adalah kesediaan masyarakat untuk ikut terlibat secara fisik maupun emosional serta bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan”. Menurut Isbandi (2007:27) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Desa

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai kepada masyarakat desa. Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Desa telah memiliki definisi sendiri menurut perkembangan peraturan perundangan di Indonesia. Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa

Pengertian pembangunan desa menurut Adisasmita (2006), bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat.

Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1981:77) pembangunan desa diartikan sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004: 43) pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Menurut Peet and Hartwick (2009) pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, atupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu, suatu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa kata-kata yang tertulis ataupun lisan, dan bukan dari hipotesis yang diukur dengan angka-angka.

Fokus Penelitian

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur
 - 1.1. Partisipasi dalam proses perencanaan
 - 1.2. Partisipasi dalam proses pelaksanaan
 - 1.3. Partisipasi dalam proses memanfaatkan hasil
 - 1.4. Partisipasi dalam evaluasi
2. Faktor penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Partisipasi Dalam Proses Perencanaan

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa dalam pembangunan. Dalam hal ini perencanaan kegiatannya meliputi musyawarah yang dilakukan di kantor desa. Maka setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah Musyawarah pembangunan tingkat desa (Musbangdes). Mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui Musbangdes. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah dana program alokasi desa serta dilanjutkan dengan merencanakan pembangunan yang akan dibangun. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan diharapkan dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program yang akan dilaksanakan.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Selain itu untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan perubahan sautu persepsi pemerintah dalam pembangunan serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik yang diberikan oleh masyarakat karena kritik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat.

Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa maka pengembangan peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam pembangunan desa yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan pembangunan disini diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai output atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut :

1. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi.
2. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri.
3. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan.
4. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama.
5. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

Partisipasi Dalam Proses Pelaksanaan

Dari hasil wawancara penulis sebagai peneliti dengan bapak Imanuel dan Bapak Izul program-program yang direncanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa hanya sebagai fasilitator untuk merumuskan keinginan dan harapan masyarakat. Dalam setiap program yang direncanakan pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat tentunya akan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan harapannya.

Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memosisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologis. Sebagai “metode” ia lebih ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai. Sebagai “program” maka tekanannya pada bidang-bidang dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan sebagai “gerakan” maka pembangunan desa ditekankan kepada kerangka ideologi yang mendasari dan mengarahkan proses, metode dan program pembangunan desa itu sendiri. Lebih penting dari semua itu adalah ketika pembangunan desa telah menjadi “gaya hidup”. Artinya orientasi untuk mencapai keadaan yang lebih baik telah tertanam sebagai komitmen umum masyarakat yang melembaga, sehingga dalam perjalanan waktu selalu diupayakan agar dengan sumberdaya, aset dan kemampuan yang dimiliki dapat dicapai kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan desa sepenuhnya dapat pula dilihat dari berbagai segi. Ia merupakan suatu proses perubahan dari tata cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang lebih maju. Ia juga merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemampuan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka punyai. Banyak pakar pembangunan desa, khususnya negara berkembang berpendapat bahwa strategi pembangunan berencana dipandang mampu mempercepat proses perubahan itu. Dalam pembangunan seperti ini masyarakat perlu berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan disamping keikutsertaan pihak-pihak luar. Masyarakat ikut serta dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka serta ikut dalam pelaksanaannya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada pada mereka (Ginting, 2000).

Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena realisasinya berusaha menyentuh segala lapisan masyarakat, melalui pembangunan yang menyeluruh, menyebar luas ke seluruh pedesaan dan dengan menggali serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Memadukan arah pembangunan sektoral maupun regional sesuai dengan kebutuhan esensial masyarakatnya. Kebijakan pelaksanaan dalam pembangunan desa adalah gambaran dari suatu proses pembangunan ke arah terciptanya Desa Swasembada sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan Pancasila.

Partisipasi dalam Proses Memanfaatkan Hasil

Dari hasil wawancara penulis sebagai peneliti dengan Bapak Adiwijaya dan Bapak Riki Pembangunan Desa yang dilaksanakan akan dilakukan dengan

melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan dimasa sekarang tetapi juga diprogramkan untuk jangka yang berkelanjutan, alternatif program pembangunan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggungjawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pendidikan melalui pelatihan, partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi dan partisipasi dalam memberikan alternatif rencana atau program dan usulan kepada pemerintah.

Partisipasi Dalam Proses Evaluasi

Evaluasi program adalah langkah awal pengumpulan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian tindak lanjut yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan. Sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak ragam atau jenis evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program. evaluasi program dalam tiga hal sehingga evaluator yang tidak memahami kondisi politik akan kaget dan mungkin frustrasi. Ketiga hal tersebut adalah :

1. Kebijakan dan program yang dievaluasi dapat terlaksana karena dukungan keputusan politik.
2. Karena evaluasi program dilakukan untuk member masukan pada pengambilan keputusan maka laporan hasil evaluasi program akan masuk ke dalam arena politik.
3. Evaluasi program itu sendiri adalah sosok kegiatan politik karena didalamnya terkandung pernyataan politis tentang isu dan permasalahan yang dihadapi program, legitimasi tujuan program, dan strategi pengembangan program serta kegunaannya bagi peningkatan dan perluasan program.

Ketiga hal tersebut dikaitkan dengan politik pelayanan kepada masyarakat dan bangsa. Disamping evaluasi program dilakukan sebagai sosok kegiatan politis, evaluasi ini pun merupakan sosok administrative. Suatu program mungkin saja memenuhi persyaratan teknis, tetapi apabila tidak diimbangi dengan persyaratan administratif maka pelaksanaan program itu akan terhambat. sebagai

misal, hubungan kerja antara pelaksana dan staf akan rendah atau mungkin saling menentang antara satu dengan yang lainnya apabila administrator tidak mendukung program dan tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Apabila fasilitas dan sumber pendukung tidak cukup kebijakan keuangan tidak jelas atau hubungan dengan masyarakat tidak harmonis maka program pun akan mengalami hambatan.

Dari hasil wawancara penulis sebagai peneliti dengan Bapak Adi Wijaya dan Bapak Muspihan bahwa evaluasi yang dilaksanakan di Desa Benua Baru melalui beberapa upaya diantaranya membuat pertemuan dan pembuatan kotak saran sehingga masyarakat dapat menilai pembangunan yang telah dilaksanakan bisa melalui kotak saran. Sehingga masuka

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan di wilayah Pedesaan, maka sudah jelas bahwa partisipasi masyarakat Pedesaanlah yang menjadi kunci keberhasilannya. Namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

Berikut wawancara penulis dengan Bapak Adiwijaya sebagai Sekertaris Desa Benua Baru mengutarakan :

“Kami tidak bisa pungkiri bahwa keterbatasan fasilitas yang kami miliki dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa misalnya tempat yang tidak memadai dan konsumsi yang masih terbatas. Selain itu juga banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang berdasarkan dari usulan masyarakat itu sendiri”. (wawancara 28 September 2018)

Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku manusia itu sendiri untuk melakukan suatu tindakan untuk terlibat di dalam suatu kegiatan pelaksanaan pembangunan perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya faktor utama yang mendukung, yaitu salah satunya adalah kemauan. Kemauan dari dalam masyarakat itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat di dalam suatu kegiatan pembangunan apalagi kegiatan pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas mereka sebagai masyarakat setempat. Sehingga mereka tergerak untuk terlibat di dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Hal ini juga diperkuat Bapak Ardi sebagai masyarakat desa Benua Baru mengutarakan :

“kami sebagai masyarakat sadar dengan fasilitas yang masih terbatas, kemudian kurangnya kesadaran dari kami masyarakat untuk terlambat dalam proses pembangunan desa, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam pembangunan desa”.(wawancara 28 September 2018)

Dari hasil wawancara penulis sebagai peneliti dengan Bapak Adiwijaya dan Bapak Ardi bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di desa Benua Baru telah melibatkan masyarakat namun beberapa kendala seperti dijelaskan di wawancara diatas dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Benua Baru pada tahap perencanaannya pemerintah desa melibatkan masyarakat desa sehingga pada pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat desa, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. pembangunan desa yang ada di Benua Baru Kepala Desa membuat program dari sumber daya yang ada, masyarakat, tokoh masyarakat, karang taruna, organisasi masyarakat diundang untuk membuat atau membicarakan program apa saja yang akan diusulkan kepada pemerintah, selanjutnya akan membahas program yang ditentukan dari beberapa program yang diusulkan.
2. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi tenaga, pikiran dan dana guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Pembangunan Desa Benua Baru yang dilaksanakan akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan dimasa sekarang tetapi juga diprogramkan untuk jangka yang berkelanjutan, alternatif program pembangunan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pembangunan Desa yang dilaksanakan akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan dimasa sekarang tetapi juga diprogramkan untuk jangka yang berkelanjutan, memanfaatkan hasil pembangunan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga pembangunan akan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu

mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan keinginan masyarakat. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi obyektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan merupakan suatu kebutuhan.

4. Partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi adalah masyarakat yang diikutsertakan atau turut berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. bahwa evaluasi yang dilaksanakan pada pembangunan Desa Benua Baru melalui masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan input dari masyarakat kemudian diproses bersama-sama setelah itu hasil dari input yang telah diproses bersama-sama akan dikeluarkan sebagai hasil akhir.
5. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa adalah faktor intern yang meliputi kesadaran, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Sedangkan faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan/fasilitas.

Saran

1. Dalam hal membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Benua Baru diharapkan lebih aktif di dalam perencanaannya, dalam hal perencanaan diharapkan lebih aktif sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam hal membahas pembangunan desa lebih baik mengetahui sumber data yang akan dikelola didesa sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam pembangunan.
3. Dalam hal pembangunan desa yang dilaksanakan diharapkan adanya kerjasama pemerintah desa dan masyarakat untuk mengawasi pembangunan desa.
4. Dalam hal evaluasi diharapkan adanya tempat-tempat untuk menilai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 2007, Evaluasi kebijakan Publik, FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed, 2009, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta.
- Adisasmita, R., 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agus, Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara.
- Agus, Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara.

- Astrid S.Susanto, 2009, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, TK.Bica Cipta.
- Beratha, N.I., 2002, Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B.S. Muljana, 2005, Perencanaan Pembangunan Nasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- C.S.T Kansil. 2003. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa, Ghalia Nasional, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jayadinata, Johara T. Dan Pramandika, I.G.P. 2006, Pembangunan desa dalam perencanaan, ITB, Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar. 2006. Pembangunan Untuk Rakyat: Memaduan Pertumbuhan dan Pemerataan. Cides, Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.
- Soetrisno, Loekman, 2005, Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.
- Soleh, Chabib, 2014, Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan, Fokus Media, Bandung.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Repika Aditama.
- Sugiartoto, Agus Dody, 2003, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Solo, IPGI, Solo.
- Widodo, Tri., 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah), UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2003, Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan, Media Pressindo, Yogyakarta.